

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa karena melalui pendidikanlah sebuah bangsa akan mampu menjaga harkat dan martabatnya. Pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini diuraikan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Maka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut dilaksanakan melalui visi pendidikan nasional, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warganegara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi :1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3) meningkatkan kesiapan

masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional maka dilakukan pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar nasional pendidikan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) tuntutan dunia kerja; g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) agama; i) dinamika perkembangan global; dan j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Selanjutnya pada pasal 37 UU Sisdiknas tersebut juga dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah diantaranya wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) di Indonesia merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based*

Ai Tin Sumartini, 2012

Pengaruh Pembelajaran Pkn Berbasis Project Citizen
Terhadap Pengembangan Kompetensi Warganegara Di Era Global
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

education". Pendidikan berbasis nilai ini berdasarkan nilai-nilai karakter yang telah mempribadi dan terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu tata nilai adat istiadat, kesusilaan, norma agama maupun peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang sangat kaya, maka selayaknya dikembangkan model pendidikan nilai yang mampu memperkokoh dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Sauri (2011) bahwa :

Pendidikan nilai dapat menjadi sarana ampuh dalam menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat global dewasa ini. Sejalan dengan derap laju pembangunan dan laju perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,serta arus reformasi sekarang ini, pendidikan nilai semakin dirasa penting sebagai salah satu alat pengendali bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara utuh.

Pendidikan nilai di Indonesia seyogyanya berpijak pada nilai-nilai keagamaan, nilai demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, dan nilai sosial-kultural yang ber Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang dijelaskan Djahiri (1985:21) bahwa "pengajaran nilai moral menghendaki lahirnya generasi muda yang memiliki sejumlah bekal sistem nilai baru yang positif sebagai landasan dan barometer kehidupan, dan lebih jauh lagi sebagai generasi pelurus dan pembaharu nilai moral menuju nilai moral yang diinginkan, yaitu nilai moral Pancasila".

Kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan menurut Budimansyah dan Suryadi (2008:180) dibangun atas dasar paradigma baru sebagai berikut:

1. Secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warganegara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab.

2. Secara teoretik memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (*civic knowledge, civic disposition, dan civic skills*) yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
3. Secara programatik menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku dan pelatihan keterampilan sebagai warganegara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mengacu pada kompetensi kewarganegaraan. Untuk dapat mencapai kompetensi kewarganegaraan tersebut, maka dalam pelaksanaannya terdapat empat hal yang harus jadi penekanan dalam Pendidikan kewarganegaraan, yaitu :

1. Pendidikan Kewarganegaraan bukan merupakan indoktrinasi politik
2. Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan *state of mind* dalam upaya pembentukan karakter warganegara yang cerdas dan bernalar tinggi
3. Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses pencerdasan dengan menekankan pada latihan menggunakan daya nalar dan logika
4. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai laboratorium demokrasi, sikap dan perilaku demokratis yang dikembangkan dengan pembelajaran yang demokratis.

(Suryadi dan Budimansyah : 2004)

Pendapat ini sesuai dengan misi mata pelajaran PKn itu sendiri, yakni sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam memasuki era globalisasi, pendidikan harus bergeser ke arah pendidikan yang berwawasan global. Dari perspektif kurikuler pendidikan berwawasan global berarti menyajikan kurikulum yang bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Hal ini dikarenakan dengan wawasan perspektif global kita dapat menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan terkotak-kotak oleh batas subyektif primordial (lokalitas) seperti perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme yang sempit, sehingga pemikiran kita lebih berkembang.

Sebagai langkah strategis, dunia pendidikan harus melakukan rekonstruksi pemikiran menuju pemikiran yang lebih transformatif dan berwawasan global, yakni sebuah pemikiran yang mampu membaca kondisi riil masyarakat di dunia global saat ini yang di antaranya peluang dan tantangannya dalam keberlangsungan hidup manusia serta mampu mengambil sikap yang berwawasan masa depan dengan tetap mengawali nilai-nilai humanis dalam pendidikan. Cita-cita pendidikan kita sekarang dapat menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran kritis dengan membawa perubahan sosial di masyarakat begitu cepat. Tentunya pemikiran pendidikan kita bisa mengarah pada pendidikan yang bertransformatif dan berwawasan global. Realitanya, ternyata dunia pendidikan kita masih didominasi oleh proses pengalihan ilmu pengetahuan semata dengan menghasilkan produk manusia mekanik yang tidak memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi riil yang terjadi di masyarakat, dan terkait dengan fitrah manusia sebagai sumber masalah, (Wijaya:2008).

Ai Tin Sumartini, 2012

Pengaruh Pembelajaran Pkn Berbasis Project Citizen
Terhadap Pengembangan Kompetensi Warganegara Di Era Global
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

Somantri (2001:190) menegaskan pentingnya pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang berorientasi global, dengan menampilkan pendidikan global (*global education*). Lebih lanjut beliau mengatakan,

...dinamika masyarakat dan globalisasi sangat dirasakan terutama bahan ajar yang selama ini terlalu menitikberatkan kepada teori-teori dan *non-functional knowledge*. Isi bahan ajar seperti itu, praktis tidak dapat memperkaya atau menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan derasnya globalisasi dalam teori maupun gejala dan masalah-masalah kemasyarakatan yang berhubungan satu sama lain.

Kecenderungan global menurut Wahab (2006) secara umum meliputi : “*the global economy, technology and communication and population and environment.*”

Fenomena global dalam Suriakusumah (2007), ditandai dengan hal-hal sebagai berikut: yaitu;

1. Revolusi dalam sistem komunikasi dan transportasi
2. Penggabungan perekonomian lokal, regional, nasional menjadi perekonomian global
3. Meningkatnya intensitas interaksi antar bangsa yang menciptakan budaya global sebagai paduan dari lokal dan nasional yang beragam
4. Munculnya sistem internasional yang mengikis batas politik nasional
5. Meningkatnya dampak dari aktivitas manusia terhadap ekosistem bumi

Berdasarkan pendapat di atas, kiranya dapat dikemukakan sejumlah tema atau isu global yang menjadi perhatian penting bagi pembaharuan konsep Pendidikan Kewarganegaraan. Sejumlah isu global tersebut antara lain: pasar bebas; korporasi internasional; teknologi komunikasi; ekosistem dan lingkungan hidup; isu kependudukan seperti kesehatan, pertumbuhan dan migrasi ; keragaman budaya (multikultural); nilai-nilai individualisme, konsumerisme dan

materialisme; dan isu politik global seperti berakhirnya negara bangsa dan tumbuhnya organisasi internasional.

Adanya isu global ini tidak dapat dilepaskan dan menjadi bagian penting dari Pendidikan Kewarganegaraan dewasa ini. Sebagaimana dikatakan oleh Cogan & Derricot (1998) bahwa “... *that current modes of educating for citizenship will not be sufficient as we enter a new century. They require that citizen be able to focus upon many diverse elements, issues dan contexts simultaneously ...*”. Hal ini mengandung makna bahwa konsep Pendidikan Kewarganegaraan sekarang ini dianggap tidak cukup bagi warganegara untuk memasuki abad baru. Warganegara memerlukan kemampuan untuk menanggapi dan menfokuskan diri pada elemen-elemen yang beragam, berbagai isu dan konteks global. Namun tetap memegang teguh jati diri bangsa, mempertahankan nilai-nilai kepribadian bangsa sebagai bangsa yang bermartabat. Selalu berupaya untuk meningkatkan kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa dengan menunjukkan sikap dan karakter yang baik yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Maka di tengah-tengah kehidupan global ini diperlukan kompetensi warganegara yang unggul, yaitu kemampuan warganegara yang dapat mengangkat citra bangsa dan mengharumkan nama baik negaranya.

Selanjutnya Branson (1998: 8-25) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan *civic competences* (kompetensi kewarganegaran). Adapun aspek-aspek *civic competences* tersebut terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan (*civic*

knowledge), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

Budimansyah dan Suryadi (2008: 38-40) menjelaskan tentang penelitian lintas Negara yang dilakukan oleh *Civic Education Policy Study (CEPS)* yang mengkaji “...*the changing character of citizenship over the next twenty years and the implications of these changes for educational policy for nine participating nations and beyond*”. Hal ini menjelaskan tentang perubahan karakter kewarganegaraan untuk lebih dari 25 tahun mendatang beserta implikasinya terhadap perubahan kebijakan pendidikan pada sembilan Negara yang terlibat dalam kajian itu serta Negara lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh *Civic Education Policy Study (CEPS)* itu memberikan gambaran kewarganegaraan yang beraneka ragam yang muncul dari data tersebut, dengan menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 membutuhkan satu pendekatan yang lebih holistik yang ditandai oleh kesempurnaan dan konsistensi pada isi maupun cakupannya dengan merumuskan satu model kewarganegaraan multidimensi (*Multy Dimentional Citizenship = MDC*). Hal ini menggambarkan konseptualisasi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang kompleks, beraneka segi yang mungkin dibutuhkan jika warganegara harus mengatasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di awal dekade abad ke-21.

Namun dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini, bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang ambing di tengah-tengah masyarakat Internasional. Maka bangsa

Ai Tin Sumartini, 2012

Pengaruh Pembelajaran Pkn Berbasis Project Citizen
Terhadap Pengembangan Kompetensi Warganegara Di Era Global
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kejujuran, kedamaian, kesetaraan.

Sebagaimana salah satu isi pidato Presiden Republik Indonesia Ir.

Soekarno di muka Sidang Umum PBB ke-XV, 1960 yang menyatakan :

Akan tetapi saya sungguh-sungguh percaya bahwa Pancasila mengandung lebih banyak daripada arti nasional saja. Pancasila mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional...Saya percaya, bahwa ada jalan keluar daripada konfrontasi ideologi-ideologi ini. Saya percaya bahwa jalan keluar itu terletak pada dipakainya Pancasila secara universal !
(To Build the World A New-Pidato Ir.Soekarno di muka Sidang Umum PBB ke-XV, 1960, dalam Saragih, 2011)

Wahab (2006) menyatakan bahwa hal-hal yang dianggap berpengaruh terhadap konsep pendidikan kewarganegaraan diantaranya adalah 1) gagalnya konsep pendidikan kewarganegaraan di masa lalu, 2) terjadinya perubahan sistem politik, 3) perubahan atribut warganegara , 4) pengaruh kecenderungan global dan 5) kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mempunyai misi mewujudkan *good and smart citizen* sudah semestinya dapat mengembangkan kompetensi siswa secara terintegrasi baik itu *knowledge, skills* maupun *disposition* (Branson, 1999). Namun, setelah sekian lama pembelajaran PKn maupun dengan nama lain yang berbeda dimasukkan menjadi pelajaran wajib di persekolahan, pembelajaran PKn masih kurang mengembangkan aspek *skills* dan *disposition*. Hal tersebut dapat dilihat dari kendala-kendala dan keterbatasan yang dihadapi pembelajaran PKn sebagaimana dikemukakan oleh Budimansyah

(2009: 21) seperti: (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru/dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengarah pada misi yang ideal. Argumentasi di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kerr (1999:5-7), bahwa pembelajaran PKn di Indonesia mencerminkan kategori minimal yang hanya mewedahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran dan hasilnya mudah diukur.

Dari pemaparan tersebut, dapat kita ketahui bahwa selama ini proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif. Seharusnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Jauhnya perilaku siswa dari isi pesan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab (1999:2) menunjukkan kurang efektifnya pembinaan nilai-nilai moral di sekolah. Bahkan dalam kasus yang lebih besar, yakni berbagai krisis yang dialami Indonesia dewasa ini disebabkan adanya degradasi moral nampaknya bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu. Banyak faktor penyebab pelajar melakukan pelanggaran dan tindak kejahatan, sehingga tidak dapat disebutkan karena lemahnya salah satu aspek saja yaitu aspek pendidikan (pendidikan

formal). Secara terperinci krisis moral yang melanda bangsa Indonesia diungkapkan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007: 166) sebagai berikut:

Kekerasan, pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, kolusi dengan baju profesionalisme, nepotisme lokal dan institusional, penyalahgunaan wewenang, konflik antar pemeluk agama, pemalsuan ijazah, konflik buruh dengan majikan, konflik antara rakyat dengan penguasa, demonstrasi yang cenderung merusak, koalisi antar partai secara kontekstual dan musiman, politik yang kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, otonomi daerah yang berdampak tumbuhnya etnosentrisme dan lain-lain.

Kondisi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tersebut perlu disikapi dengan bijak, terutama dalam pembinaan generasi muda di lingkungan persekolahan, termasuk dalam pembelajaran PKn terutama dalam penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran yang mengandung muatan tatanan nilai sehingga dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang kurang bermuatan nilai-nilai praktis namun hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku, kurang fleksibel, kurang demokratis, dan guru cenderung lebih *dominan one way method*. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada kurikulum nasional, di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton, aktivitas guru lebih dominan daripada siswa, akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai, sikap, dan tindakan; sehingga mata

pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warganegara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan.

Maka dari itu dalam proses pembelajaran harus dirancang suatu model pembelajaran dimana siswa harus mampu mengembangkan seluruh potensinya agar menjadi warganegara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, demokratis dan bertanggung jawab, sehingga perlu dikembangkan suatu proses pembelajaran yang *humanistik* dimana suasana belajar mengajar bersifat kekeluargaan, hangat dan terbuka (Djahiri, 1985). Lebih lanjut Djahiri (2002:93) mengemukakan bahwa:

Salah satu pembaharuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah pola/strategi pembelajarannya, dimana siswa bukan hanya belajar tentang hal ihwal (materi pembelajaran) Pendidikan Kewarganegaraan melainkan juga belajar ber-Pendidikan Kewarganegaraan atau praktek, dilatih uji coba dan mahir serta mampu membakukan diri, bersikap perilaku sebagaimana isi pesan Pendidikan Kewarganegaraan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Cheng dalam Winataputra dan Budimansyah (2007: 3) bahwa kurikulum dan pembelajaran yang perlu dikembangkan untuk abad ke-21 ini seyogyanya mengembangkan visi “*globalization, localization, and individualization for multiple intelligence*”. Visi tersebut pada dasarnya terpusat pada pengembangan “*learning intelligence*” dalam dimensi-dimensi “*social, cultural, political, economic, and technological intelligences*”, sebagaimana dikenal secara utuh dalam “*Pentagon Theory of Contextualized Multiple Intelligence*”. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bersifat dan bermuatan multidimensional yang menuntut adanya upaya

pengembangan kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada konsep “*contextual multiple intelligence*” dalam nuansa lokal, nasional dan global.

Guru memiliki peran untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran serta tersedianya media, sarana, dan prasarana pembelajaran. Pembelajaran harus mampu merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran yang tepat, yang mencakup aspek tujuan, proses pembelajaran, materi, metode dan alat evaluasi atau penilaian. Sebagai mata pelajaran normatif, bidang studi PKn mengkaji tentang aspek etika, moral, norma dan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik yang demokratis dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan Negara. Maka guru memegang peranan yang sangat penting, demikian pula guru PKn harus profesional dalam memilih metode yang bervariasi dalam penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif, mulai dari persiapan dan perencanaan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, pendekatan dan model pembelajaran sampai pada tahap evaluasi, yang semuanya tentunya mengarah pada situasi dan kondisi pembelajaran yang demokratis, sehingga dapat membentuk budaya demokrasi di lingkungan sekolah.

Model pembelajaran yang dianggap mendukung dalam pembelajaran PKn, khususnya dalam upaya mengembangkan kompetensi siswa melalui pembelajaran

Ai Tin Sumartini, 2012

Pengaruh Pembelajaran Pkn Berbasis Project Citizen
Terhadap Pengembangan Kompetensi Warganegara Di Era Global
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

berbasis *project citizen*, karena model ini bertujuan untuk memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis, sehingga siswa dilatih untuk menerapkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi yang berlaku di masyarakat dan negara serta diharapkan siswa dapat melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik.

Budimansyah (2009:1) menjelaskan bahwa “*Project Citizen* merupakan satu *instructional treatment* berupa kegiatan pembelajaran yang berbasis masalah (*social issues or problems*) bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), watak (*disposition*) warganegara yang demokratis dan memungkinkan untuk mendorong partisipasi dalam pemerintahan dan masyarakat sipil yang beradab.”

Project citizen sebagai suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik-empirik yang dapat mendorong kompetensi, tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik, belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*), memberanikan diri untuk berperan serta dalam kegiatan antar siswa, antar sekolah, dan antar anggota masyarakat.

Program ini memberikan peluang yang menantang kepada siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan, mengungkap berbagai permasalahan di sekolah maupun di masyarakat sekitar dan memperoleh sumber intelektual yang diperlukan untuk kewarganegaraan yang demokratis yang bertanggung jawab.

Ai Tin Sumartini, 2012

Pengaruh Pembelajaran Pkn Berbasis Project Citizen
Terhadap Pengembangan Kompetensi Warganegara Di Era Global
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu

Budimansyah (2009: 23) mempertegas bahwa fokus perhatian dari model *Project Citizen* ini adalah pengembangan “*civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic dispositions* (kebijakan kewarganegaraan) *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), *civic confidence* (kepercayaan diri kewarganegaraan), *civic commitment* (komitmen kewarganegaraan), *civic competence* (kompetensi kewarganegaraan)” yang bermuara pada berkembangnya “*well-informed, reasoned, and responsible decision making* (kemampuan mengambil keputusan berwawasan, bernalar, dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian, penggunaan model *project citizen*, dapat lebih memotivasi belajar siswa, karena strategi instruksional yang digunakan dalam model ini menurut Budimansyah (2009:23) bertolak dari strategi “*inquiry learning, discovery learning, problem solving learning, research oriented learning*”. Sehingga pembelajaran ini sesuai dengan pendapat Somantri (2001:225), bahwa “untuk meningkatkan keberhasilan dalam pendidikan moral hendaknya dalam topik-topik tertentu digunakan pendekatan metode penyampaian yang berorientasi pada *field psychology*, pendekatan pemecahan masalah dan metode inkuiri.” Selanjutnya dijelaskan pula tentang perlunya “hidden curriculum” agar seluruh program di sekolah dan masyarakat memberikan sumbangan dalam meningkatkan keberhasilan pendidikan moral, dimana pembelajaran *project citizen* sebagai model adaptif paradigma baru dalam PKn yang memiliki muatan pendidikan nilai moral.

Lebih lanjut model pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendorong dan memberdayakan para siswa melaksanakan hak dan tanggung jawab sebagai warganegara yang demokratis melalui pengkajian terhadap isu-isu kebijakan publik secara intensif baik di sekolah maupun di masyarakat. Bahan-bahan belajar dirancang untuk membantu siswa belajar mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik, mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh seorang warganegara yang bertanggung jawab, dan menjadi percaya diri dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan.

Dengan demikian anggapan siswa selama ini tentang pelajaran PKn yang tidak menarik dan membosankan sedikit demi sedikit menjadi hilang. Kesan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, jika dipandang dari proses pembelajaran hal ini timbul mungkin diakibatkan secara substansif mata pelajaran PKn kurang menyentuh kebutuhan siswa atau cara penyajiannya tidak membangkitkan minat belajar siswa (Wahab,2006 : 26).

Berdasarkan pemikiran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pengaruh pembelajaran PKn berbasis *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi warganegara di era global.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "*Bagaimana perbedaan kompetensi warganegara siswa di era global pada kelas pembelajaran PKn berbasis project citizen dengan kelas pembelajaran PKn tidak berbasis project citizen?*"

Dari rumusan masalah tersebut selanjutnya masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan yang positif signifikan pengembangan kompetensi warganegara di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen* ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang positif signifikan pengembangan kompetensi pengetahuan warganegara di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen* ?
3. Apakah terdapat perbedaan yang positif signifikan pengembangan kompetensi watak warganegara di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen* ?
4. Apakah terdapat perbedaan yang positif signifikan pengembangan kompetensi keterampilan warganegara di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengkaji secara mendalam pengaruh Pembelajaran PKn berbasis *Project Citizen* terhadap pengembangan kompetensi warganegara di era global. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menemukan :

1. Perbedaan yang positif signifikan pengembangan kompetensi warganegara di era global dengan pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen*.
2. Perbedaan yang positif signifikan pengembangan kompetensi pengetahuan warganegara di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen*.
3. Perbedaan yang positif signifikan pengembangan kompetensi watak warganegara di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen*.
4. Perbedaan yang positif signifikan pengembangan kompetensi keterampilan warganegara di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen*.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gall dan Borg (2003:402) menegaskan bahwa penelitian quasi eksperimen merupakan : “*A type exsperimen in which research participants are not randomly assigned to the exsperimental and control groups*”. Maksudnya bahwa dalam penelitian quasi eksperimen individu tidak dipilih secara acak untuk mempunyai peluang yang sama baik dalam kelompok uji coba maupun kelompok kontrol.

Tujuan penelitian dengan metode kuasi eksperimen adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi peneliti yang dapat diperoleh melalui eksperimen sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Hal ini senada dengan pendapat Ali (1992:140):

Kuasi eksperimen hampir sama dengan eksperimen sebenarnya perbedaannya terletak pada penggunaan subjek yaitu kuasi eksperimen tidak dilakukan penugasan random, melainkan dengan menggunakan kelompok yang sudah ada (*intact group*).

Adapun desain eksperimen yang peneliti lakukan adalah *Pretest-Posttest, Non-Equivalent Control Group Design*. Dengan merujuk pada pendapat Cresswell (1994:132), yaitu :

“In this design a popular approach to quasi exspermental group A and the control B are selected without random assignment. Both groups take a pretest and posttest and only the exspermental group received the treatment”.

Pendapat di atas mengandung makna bahwa dalam penelitian kuasi eksperimen dengan desain *Pretest-Posttest, Non-Equivalent Control Group Design* adalah baik grup A sebagai kelas eksperimen maupun grup B sebagai kelas kontrol dipilih tanpa acak, di mana masing-masing grup diberikan pretest dan posttest serta hanya kelas eksperimenlah yang diberikan perlakuan atau *treatment*.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam pendidikan terutama mengenai

pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi warganegara di era global.

Dari segi kebijakan formal penelitian ini berguna sebagai referensi untuk mempertegas bahwa pengembangan kompetensi warganegara di era global dapat dilakukan melalui Pembelajaran PKn berbasis *project citizen*.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam penelaahan secara kritis tentang pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi warganegara di era global. Sedangkan dari segi isu serta aksi sosial penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus sebagai stimulus untuk menggugah kesadaran warganegara dalam mengembangkan kompetensi warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era global.

F. Struktur Organisasi Tesis

Sebagai Pendahuluan, Bab I menyajikan latar belakang permasalahan yang memberi konteks munculnya masalah; identifikasi dan perumusan masalah ; tujuan penelitian; manfaat/signifikansi penelitian; dan struktur organisasi tesis.

Dalam Bab II disajikan kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian. Kajian pustaka yang berisi deskripsi, analisis konsep, teori-teori, dan penelitian terdahulu yang relevan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran PKn berbasis *project citizen*, kompetensi kewarganegaraan, dan keterkaitan antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* terhadap pengembangan kompetensi warganegara di era global. Kerangka pemikiran

merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskan hipotesis dengan mengkaji teoritis antarvariabel penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian atau submasalah yang diteliti.

Bab III mengenai metodologi menguraikan lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, desain penelitian dan justifikasi pemilihan desain penelitian, metode penelitian dan justifikasi penggunaan metode penelitian tersebut, definisi operasional yang dirumuskan dalam setiap indikator, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya, serta analisa data.

Dalam Bab IV, disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengolahan atau analisa data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan.

Selanjutnya dalam Bab V disajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada pengguna hasil penelitian, dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

